

LAPORAN KINERJA

(LKJ)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PESISIR SELATAN

TAHUN 2018



PESISIR SELATAN

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmatNya Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2018. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan, atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam membantu Bupati Pesisir Selatan menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 3 Tahun 2016.

Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan dalam tahun 2018, yang meliputi kinerja atas tiga pilar utama kebijakan nasional di bidang pendidikan yaitu: (1) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan (2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan. Selain itu, juga mengacu pada lima misi Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, kesetaraan dan kapasitas Layanan Pendidikan.

Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan, yang setiap tahun secara bertahap terus diupayakan dan ditingkatkan oleh Pemerintah, bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah, secara bertahap pula telah dilaksanakan berbagai program pembangunan pendidikan nasional, guna merealisasikan target-target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021

Melalui laporan ini, Dinas Pendidikan berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pembangunan bidang pendidikan tahun 2018, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan nasional pada tahun-tahun mendatang.

Painan, 31 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



H. ZULKIFLI S.Pd.M.Pd
NIP. 195912311985121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKJ (Laporan Kinerja) dibuat sebagai implementasi Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik (Renstra) . Dalam LKJ ini disajikan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2018. Penyusunan LKJ ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahannegera dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*goodgovernance*”. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2018 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil Pelaksanaan Kegiatan untuk pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 ini yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas Instansi beserta seluruh jajarannya kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, oleh sebab itu LKJ merupakan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan/dikerjakan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

LKJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan maksud sebagai evaluasi kinerja , umpan balik peningkatan kinerja, peningkatan perencanaan/program di bidang pembangunan pendidikan, meningkatkan kredibilitas instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Pesisir Selatan dan mengetahui/menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pada gilirannya menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Disadari bahwa pembangunan bidang pendidikan adalah masalah yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang sangat kompleks

Sejalan dengan semangat Desentralisasi dan Otonomi di bidang Pendidikan kiranya dapat dilaksanakan pembangunan secara bertahap, terencana, sistematis, dan terkoordinasi antara Dinas dan Instansi terkait dengan melibatkan segenap unsur masyarakat dan stakeholders.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat daerah . Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang-bidang yang terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi :
 - a) Seksi Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta didik PAUD;
 - b) Seksi Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan;
 - c) Seksi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga;
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar ;
 - b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar ;
 - c) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar.
 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
 - a) Seksi Kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama ;

- b) Seksi Kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama ;
 - c) Seksi peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama.
4. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
- a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
5. Bidang Kebudayaan, membawahi :
- a) Seksi Adat dan Tradisi daerah ;
 - b) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - c) Seksi Seni dan Film
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Satuan Pendidikan Formal
- g. Satuan Pendidikan Non Formal Informal
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Sumber Daya Manusia

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

TABEL 2.1 : Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	64	72,73
2	Fungsional	24	27,27
	JUMLAH	88	100,00

TABEL 2.2 : Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Eselon II	1

2	Eselon III	6
3	Eselon IV	18
4	Fungsional umum	39
JUMLAH		64

TABEL 2.3 : Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 2	30
2	Strata 1 / diploma IV	33
3	Diploma 3	3
4	Diploma 2	0
5	Diploma 1	0
6	SLTA	22
JUMLAH		88

TABEL 2.4 : Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	32
2	Golongan III	43
3	Golongan II	13
JUMLAH		88

Tabel-Tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 88 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 64 orang dan pegawai fungsional sebanyak 24 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 64 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 6 orang, pejabat

eselon IV sebanyak 18 orang yang tersebar di tingkat, staf berjumlah 39 orang yang tersebar di tingkat kabupaten Sementara untuk jumlah pegawai fungsional yang berjumlah 39 orang terdiri dari pengawas SMP/SMA Sedangkan untuk pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari, lulusan strata dua (S2) sebanyak 30 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 33 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 3 orang, lulusan diploma, dan lulusan SLTA sebanyak 22 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 32 orang, golongan III sebanyak 43 orang, golongan II sebanyak 13 Orang.

Sementara itu, untuk urusan yang terkait kebudayaan ada pada misi tiga mempunyai tujuan :

(1) Mewujudkan sikap mental masyarakat,revitalisasi kelembagaan agama dan kelembagaan sosial masyarakat sesuai nilai-nilai agama,adat,budaya dan kearifan lokal;

Dengan sasaran :

1. Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental,sesuai dengan nilai-nilai agama,adat,budaya dan kearifan lokal;
2. Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

Adapun Kebijakan umum pembangunan pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kebudayaan antara lain adalah:

- 1) Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah;
- 2) Meningkatnya Harapan Lama Sekolah;
- 3) Lahirnya Produk Hukum daerah tentang muatan lokal;
- 4) Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi pemangku adat dan agama;
- 5) Meningkatnya fungsi dan peranan lembaga adat dan agama;
- 6) Terlaksananya Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya.

B. Perjanjian Kinerja

Guna Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah tersebut, Dinas Pendidikan tersebut diatas Dinas Pendidikan Memiliki Dua Tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan
2. Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya

Dengan Sasaran Sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan
3. Meningkatkan Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan
4. Meningkatkan cagar Budaya yang dilestarikan

Sesuai dengan Perjanjian kinerja tahun 2018, Dinas pendidikan dan Kebudayaan menetapkan

C. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA /PENANGGUNG JAWAB	TARGET
Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK PAUD	jumlah peserta Didik PAUD	Bidang PAUD DIKMAS	45,47%
		penduduk usia 4 sd 6 tahun		
	APK SD	jumlah siswa SD	Bidang Pembinaan SD	124,22 %
		jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun		
	APK SMP	jumlah siswa SMP	Bidang Pembinaan SMP	102,70 %
		jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun		
	APM SD	jumlah peserta siswa SD usia 7 sd 12 tahun	Bidang Pembinaan SD	99,58%
		jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun		
	APM SMP	jumlah peserta siswa SD usia 13 sd 15 tahun	Bidang Pembinaan SMP	90,03%
		jumlah penduduk usia 13 sd 15 tahun		
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Putus Sekolah	jumlah penduduk usia tertentu yang tidak sekolah	Bidang Pembinaan SD dan SMP	0,10%
		Penduduk usia sekolah		
Meningkatnya Mutu Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	jumlah Sekolah Berakreditasi A dan B	Bidang Pembinaan SD dan SMP	65,00%
		jumlah Sekolah keseluruhan		
	Rata-rata nilai UN	jumlah Nilai UN seluruh peserta	Bidang Pembinaan SD dan SMP	6,00%
		jumlah siswa yang ikut UN		
Meningkatnya	Persentase	jumlah seni budaya yang dibina	Bidang Budaya	40%

Jumlah Seni budaya lokal yang dilestarikan	jumlah seni budaya yang dilestarikan	Jumlah seni budaya yang terinventarisir		
Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dirawat	Bidang Budaya	50%
		Jumlah cagar budaya yang terinventarisir		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

a. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Berdasarkan perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 yang dijadikan indikator tujuan adalah

1. Angka Harapan Lama Sekolah menggambarkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) yang diukur dari aspek pendidikan. Indikator AMH diambil dari penduduk umur 7 tahun keatas yang telah menamatkan Pendidikannya melalui pendidikan Formal dan Non Formal. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 AMH Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 98.12 % dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 98.71%. Kenaikan ini disebabkan adanya program Wajib Belajar Sembilan tahun. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 – 2018.
2. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan pada periode tahun 2011 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah sebesar 8.21 tahun dan naik menjadi 8,62 pada tahun 2018.
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Indikator APK dan APM dipakai untuk melihat seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia

pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. Nilai lain yang sering dipergunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum indikator-indikator ini menunjukkan seberapa besar program-program yang dicanangkan oleh pemerintah telah berhasil seperti wajib belajar 9 tahun.

4. Angka putus Sekolah SD, SMP dan SMA kabupaten pesisir Selatan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Angka putus sekolah SD tahun 2011 sebesar 0,13%, SMP sebesar 0,23% dan SMA sebesar 0,32%, sedangkan Angka Putus sekolah SD tahun 2018 sebesar 0,07%, SMP 0,11% dan SMA sebesar 0,16%. Penurunan diatas sangat di pengaruhi oleh kesejahteraan masyarakat pesisir selatan.

B. Hasil Pengukuran kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 dapat kita lihat capaiannya melalui tabel berikut .

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN (TAHUN AKHIR RENTSR A)	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	8,2 tahun	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK PAUD	45,29	45,38	100 %
					APK SD	124,22	124,2	100 %
					APK SMP	101,61	102,32	101 %
					APM SD	99,22	99,38	100 %
					APM SMP	89,9	89,9	100 %
					Angka Putus Sekolah	0,12	0,11	92%
		2. Harapan Lama Sekolah	13,2 tahun	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	55	60	109 %
					Rata-rata nilai UN	6,5	6,55	101 %

2	Meningkatnya pengembangan Seni dan Budaya	1. Persentase cakupan seni dan budaya	55%	Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	Persentase jumlah seni budaya yang dilestarikan	25	30	120 %
				Meningkatnya benda cagar budaya yang dilestarikan	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	35	40	114 %

C. kuantifikasi Keuangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu
1	2	3	5	6
I	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	44.315.288.890	12.682.551.564	28,62%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.557.807.700	853.138.085	33,35%
2	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	148.350.000	55.650.000	37,51%
	a. Belanja Pegawai	148.350.000	55.650.000	37,51%
3	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	32.204.000	15.330.000	47,60%

		Belanja Barang dan a. Jasa	32.204.000	15.330.000	47,60%
4	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.543.000	22.905.800	75,00%
		Belanja Barang dan a. Jasa	30.543.000	22.905.800	75,00%
5	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.365.700	38.513.200	65,99%
		Belanja Barang dan a. Jasa	58.365.700	38.513.200	65,99%
6	6	Penyediaan Kompenen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	7.601.000	25,34%
		Belanja Barang dan a. Jasa	30.000.000	7.601.000	25,34%
8	8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	13.900.000	3.630.000	26,12%
		Belanja Barang dan a. Jasa	13.900.000	3.630.000	26,12%

9	9	Penyediaan Makan Dan Minum	80.585.000	33.579.000	41,67%
	a.	Belanja Barang dan Jasa	80.585.000	33.579.000	41,67%
10	10	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	202.050.000	77.304.323	38,26%
	a.	Belanja Barang dan Jasa	202.050.000	77.304.323	38,26%
11	11	Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	102.000.000	34.621.000	33,94%
	a.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000	34.621.000	33,94%
13	13	Penyediaan Biaya Operasional Unit Kerja Bawahan	238.700.000	62.992.364	26,39%
	a.	Belanja Barang dan Jasa	238.700.000	62.992.364	26,39%
16	16	Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan	30.000.000	-	0,00%
	a.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	-	0,00%
B	PROGRAM PENINGKATAN		214.604.500		34,87%